



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DI KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

LIFIO KAFITRA

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto, KM 7 Kebun Nenas,
Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

Email: Lifiokafitra@gmail.com

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Teknik penarikan sampel menggunakan simple random sampling yaitu teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Subjek penelitian adalah masyarakat Kecamatan Singingi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Keith Davis. Dalam mengumpulkan data dengan cara menyebarkan kuesioner, observasi, studi kepustakaan, studi dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan indikator-indikator yang digunakan untuk menganalisa Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Kesempatan, Kemampuan, Kemauan seluruh pengukurannya kurang baik karena hanya 1 atau kurang dari 1 item yang terlaksana dengan baik. Saran peneliti dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dengan cara memperbanyak informasi bahwa pembuatan akta kelahiran ialah gratis dan memperbanyak penyuluhan mengenai administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam suasana informal.

Kata kunci : Akta Kelahiran, Partisipasi Masyarakat.

ABSTARCT

The focus of this research is public participation levels in ownership of birth certificate at Singingi sub-district in Kuantan Singingi regency. The purpose of this research was to know how high the public participation level in the ownership of birth certificate at Singingi sub-district Kuantan Singingi regency. This study used descriptive quantitative method. The sampling technique uses simple random sampling, which is a random sampling technique from members of the population without regard to strata in the population. The subject of the study was the Singingi sub-district community. The theory used in this research is keith davis's theory. In collecting data by distributing questionnaires, observations, literature studies, documentation studies, and interview. The result of research on the level of community participation in the ownership of birth certificates in Singingi subdistrict Kuantan Singingi district have not gone well. This is based on indicators used to analyze the level of community participation in the ownership of birth certificates in Singingmi sub-district, Kuantan Singingi district, namely opportunity, ability, willingness, all measurements are not good because only one or less than one item is implemented well. Research's suggestion in increasing community participation in ownership of birth certificates in Singingi sub-district Kuantan Singingi district by increasing

informatrion that making birth certificates is free and increasing counseling on population administration and civil registration in an informal setting.

Keywords: *Birth Cerificate, Public Participation.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan tersebar di berbagai pulau. Hal tersebut merupakan salah satu modal utama dalam proses pembangunan di Indonesia, namun memiliki jumlah penduduk yang besar dapat juga jadi faktor penghambat dalam proses pembangunan, apabila proses pengolahannya kurang baik. Sehingga agar dapat mengelola jumlah penduduk yang besar dibutuhkan suatu sistem administrasi kependudukan yang berkualitas baik juga.

Salah satu fungsi mendasar dari pemerintah adalah pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowerment*), dan fungsi pelayanan (*serving*), diantaranya pelayanan terhadap hak dan identitas diri serta kewarganegaraan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Sistem Pemerintahan Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota yang semuanya memiliki pemerintahan daerah guna menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus sendiri secara mandiri setiap urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan manusia wajib dicatatkan, seperti peristiwa kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan status perkawinan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, dan peristiwa penting lainnya. Perlunya dicatat peristiwa penting tersebut sebagai bukti untuk memberikan identitas Warga Negara, dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang benar dan lengkap. Secara umum, perlunya pencatatan peristiwa penting ialah sebagai bentuk kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku, karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 2 yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Bentuk kepatuhan masyarakat terhadap hukum ialah dari awal seseorang dilahirkan, dengan mencatatkan bukti identitas untuk hak sipilnya yaitu berupa akta kelahiran.

Akta kelahiran wajib dimiliki oleh semua masyarakat, karena negara mengakui secara yuridis tentang hak-hak akta kelahiran dan akta kelahiran wajib dimiliki baik yang mempunyai keluarga atau anak yang tidak mempunyai keluarga. Sedangkan pada anak yang orang tuanya tidak memiliki akta nikah, maka pada saat melaporkan kelahiran sampai penerbitan kutipan akta kelahirannya tidak dibolehkan mencantumkan nama ayahnya pada kutipan akta kelahiran tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh antara lain :

1. Masyarakat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang tidak berpartisipasi dalam Kepemilikan Akta Kelahiran karena merasa Akta Kelahiran tidak begitu penting bagi mereka, karena mereka belum memahami fungsi dan tujuan Akta Kelahiran.
2. Masih rendahnya pemahaman orang tua mengenai kekuatan hukum Akta Kelahiran menyebabkan masyarakat yang berada di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tidak berpartisipasi dalam kepemilikan Akta Kelahiran.
3. Kurangnya persyaratan untuk pelaporan/pembuatan Akta Kelahiran menjadi alasan paling utama mengapa masyarakat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi enggan berpartisipasi.
4. Persepsi negatif terhadap kepengurusan Akta Kelahiran membuat masyarakat cenderung melibatkan jasa pihak ketiga untuk menguruskan Akta Kelahiran.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DI KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori /Konsep Ilmu Administrasi Negara

Istilah Administrasi Negara dapat di bagi ke dalam dua bentuk yakni Administrasi dan Negara. Administrasi secara etimologis berasal dari Bahasa Yunani yaitu *administrare* yang berarti melayani, membantu Sedangkan dalam Bahasa Inggris, menggunakan istilah *administration* yang sebenarnya dari kata *Ad (intensif)* dan *(ministrare to serve)* yang berarti melayani. Sedangkan Negara secara etimologis berasal dari Bahasa Inggris (*state*) yang artinya dalam Bahasa latin yaitu (*status*) yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap atau lebih sering disebut (*station*) yang berarti kedudukan.

2.1.2 Teori /Konsep Desentralisasi Administrasi

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari

rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka munculkan otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. (Syamsuddin, 2007 : 52).

2.1.3 Teori /Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007 : 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan, dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

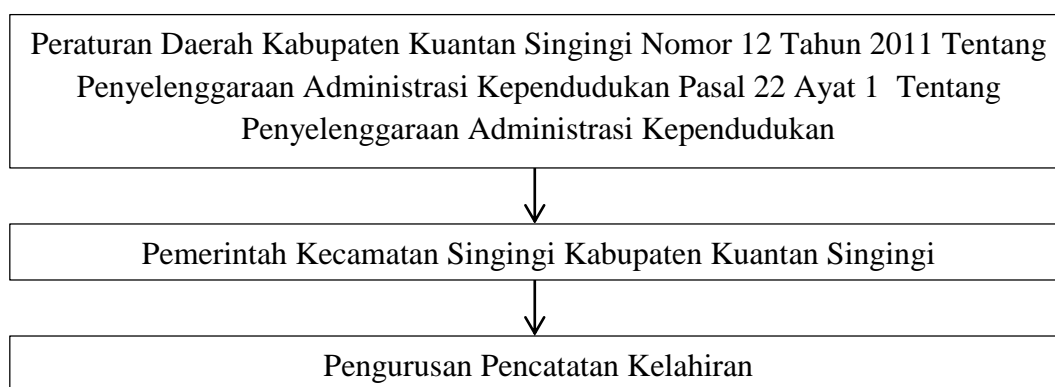
2.1.4 Teori /Konsep Kelurahan

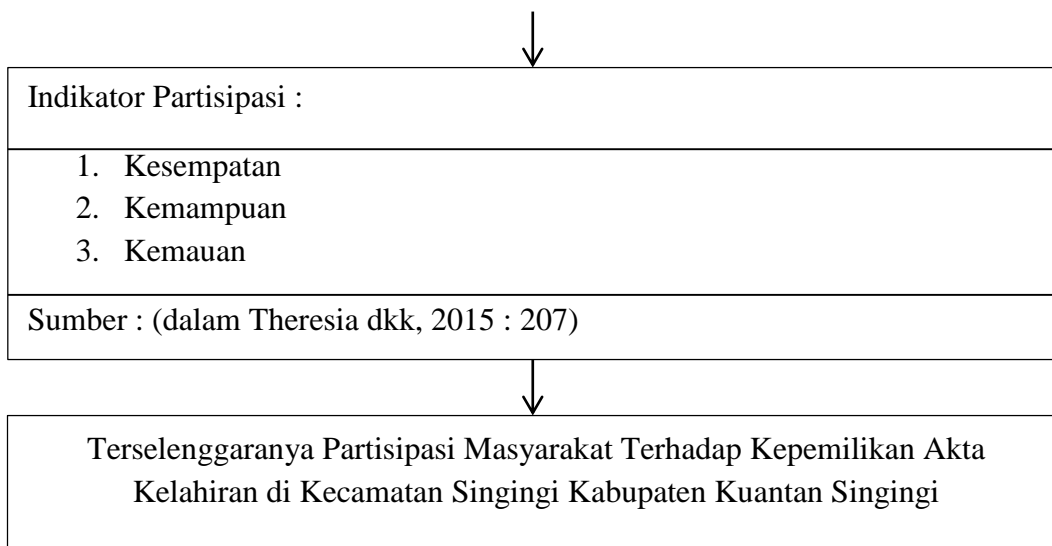
Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.

2.1.5 Konsep Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang berlaku seumur hidup, akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu.

2.2 Kerangka Pemikiran





METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu survey tingkat dengan metode kuantitatif. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. (Sugiyono, 2005 : 7)

3.1 Populasi Dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017 : 90).

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Menurut (Sugiyono, 2015 : 91) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk mengetahui Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel III.1 : Populasi dan Sampel Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Responden	Jumlah		Persentase (%)
		Populasi	Sampel	
1	Camat	1	1	100%
2	Sekretaris Camat	1	1	100%
3	Kepala Seksi	3	1	33,3%
4	Kasubbag	3	1	33,3%

5	Staf	8	2	25%
6	Masyarakat Singingi	33.459	42	0,12%
Jumlah		33.475	48	

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

3.3 Sumber Data

Penulis melakukan penelitian ini untuk mendapatkan data mengenai objek yang diteliti, data tersebut dapat dikelompokkan kedalam dua jenis data, yaitu :

3.3.1 Data Primer

Menurut (Sugiyono, 2016 : 308) Data Primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam menyusun penelitian ini, data primer yang digunakan adalah data yang peneliti peroleh langsung dari Kantor Camat Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3.2 Data Sekunder

Menurut (Sugiyono, 2016 : 137) Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Menggunakan data sekunder apabila peneliti mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak lain.

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis di Kantor Camat Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Alasan memilih lokasi penelitian ini adalah karena masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam Kepemilikan Akta Kelahiran merasa tidak begitu penting, masih rendahnya pemahaman orang tua, kurangnya persyaratan untuk pelaporan/pembuatan akta kelahiran, persepsi negatif terhadap kepengurusan Akta Kelahiran.

3.5 Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. (Sugiyono, 2016 : 162)

3.5.2 Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 2016 : 166).

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. (Sugiyono, 2015 : 329).

3.6 Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik penganalisaan secara deskriptif. Setelah data dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh, maka data tersebut bentuk dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh, selanjutnya akan dibahas dan dianalisa dalam dua bentuk.

3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019-2020											
		November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul												
2	Pembuatan Proposal												
3	Bimbingan Proposal												
4	Ujian Proposal												
5	Revisi Proposal												

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.3 Rekapitulasi Keseluruhan Indikator

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Rata-rata
		SB	B	CB	KB	TB		
1.	Kesempatan	6	62	165	7	-	48	3,29
2	Kemampuan	5	67	159	9	-	48	3,27
3	Kemauan	4	68	147	19	2	48	3,19
Jumlah		15	197	471	35	2	144	3,25
Jumlah Responden		5	66	157	12	1	48	
Persentase (%)		10	138	327	25	2	100	

Sumber : Data Olahan 2020

5.3.1 Analisis Penelitian

Berdasarkan hasil sebaran kuesioner yang telah dilakukan mengenai Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi menghasilkan nilai rata-rata 3,25 berarti berada pada interval Cukup Baik. Berarti Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi belumlah baik. Hal ini dikarenakan dari 3 indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kesempatan, Kemampuan, Kemauan hampir semua indikatornya Cukup Baik. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan dilapangan yang menunjukkan belum baiknya dalam kepengurusan Akta Kelahiran masih kurangnya informasi yang di dapat menjadi kan kesempatan partisipasi masyarakat menjadi kurang dan dalam hal ini seorang pemimpin harus ikut andil dan bagaimana caranya agar tingkat partisipasi masyarakat dalam

kepemilikan Akta Kelahiran menjadi meningkat, belum baiknya dalam kepengurusan Akta Kelahiran masih kurangnya sarana dan prasarana seperti komputer dan perangkat lainnya butuh pergantian kepada yang lebih canggih dan modern agar aparaturnya lancar dalam bekerja dan masyarakat yang mengurus Akta Kelahiran pun tidak kecewa dengan waktu yang lambat dalam penyelesaian Akta Kelahiran dengan menggunakan sarana dan prasarana yang lebih canggih, belum baiknya dalam kepengurusan Akta Kelahiran masih kurangnya petugas yang berada di bagian Akta Kelahiran agar tidak terjadi kesalahan maupun kelainan dalam bekerja dan juga masih rendahnya kepercayaan diri masyarakat untuk mengurus langsung Akta Kelahiran dan masih mengharapakan orang ketiga atau calo.

Indikator Kesempatan yaitu Kesempatan dalam partisipasi masyarakat, banyak program pemerintah yang kurang memperoleh partisipasi masyarakat karena kurangnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dari hasil sebaran kuesioner di dapat nilai rata-rata hasil penelitian yaitu 3,29 yang berada pada interval Cukup Baik.

Indikator Kemampuan yaitu Kemampuan mengenai partisipasi masyarakat, perlu disadari bahwa adanya kesempatan-kesempatan yang di sediakan/ di tumbuhkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat akan tidak banyak berarti, jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dari hasil sebaran kuesioner di dapat nilai rata-rata hasil penelitian yaitu 3,27 yang berada pada interval Cukup Baik.

Indikator Kemauan yaitu Kemauan mengenai Partisipasi Masyarakat, perlu disadari bahwa kemauan untuk berpartisipasi utamanya ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki oleh masyarakat untuk membangun dan memperbaiki kehidupannya. Kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dari sebaran kuesioner didapat nilai rata-rata hasil penelitian yaitu 3,19 yang berada pada interval Cukup Baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil sebaran kuesioner yang telah dilakukan mengenai Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 3,25 berarti pada interval Cukup Baik. Hal ini

Berdasarkan indikator-indikator yang digunakan untuk menganalisa Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Kesempatan, Kemampuan, Kemauan, hampir semua indikatornya Cukup Baik. Namun berdasarkan hasil pengamatan penulis terdapat beberapa masalah yaitu Akta Kelahiran tidak selesai tepat waktu dan Masih kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kepengurusan Akta Kelahiran.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas diajukan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan pihak pemerintah Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi memperbanyak informasi bahwa mengurus Akta Kelahiran itu gratis melalui media elektronik atau media masa, seperti melalui iklan di radio, televisi, poster, spanduk, dan lain sebagainya agar Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran Meningkat.
2. Diharapkan pihak pemerintah Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi memperbanyak atau meningkatkan penyuluhan atau sosialisasi mengenai administrasi kependudukan dan pencatatan sipil khususnya Akta Kelahiran.
3. Diharapkan pihak pemerintah Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana khususnya di bidang Akta Kelahiran agar pengurusan Akta Kelahiran bisa selesai tepat waktu.
4. Diharapkan pihak pemerintah Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi menyediakan kendaraan operasional keliling khusus untuk kepengurusan Akta Kelahiran atau administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar masyarakat lebih mudah berinteraksi dan mendapatkan informasi terkini dari pihak pemerintah kecamatan agar para masyarakat lebih semangat dalam mengurus Akta Kelahiran.
5. Diharapkan pihak pemerintah Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi meningkatkan sumber daya manusia sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pihak pemerintah kecamatan bisa memberikan pelayanan yang terbaik.
6. Diharapkan pihak Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi agar menciptakan sebuah aplikasi berbasis online dalam ruang lingkup administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar masyarakat tidak perlu ke kantor camat untuk mengantri dalam kepengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Diharapkan pihak Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi perlu nya menciptakan sebuah aplikasi e-office agar pekerjaan aparatur yang berada di kantor

camat di iringi oleh teknologi masa kini karena pada saat ini tiada pekerjaan tanpa teknologi dan agar meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, karena dengan RidhoNyalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul.

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DI KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa Proposal ini masih jauh dari kata baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan Proposal ini.

Dalam kesempatan ini juga ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan Proposal ini, diantaranya kepada:

1. Ir, Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE.,ME, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Desriadi, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi dan Selaku dosen pembimbing 1 yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya Proposal ini.
4. Bapak Alshar Andri, S.Sos., M.Si Selaku dosen pembimbing 2 yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya Proposal ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai. Orang Tua Penulis Ayahanda Maswar dan Ibunda Suhartina serta Abang Angga Kurniawan dan Kakak Riasmia Prianti yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

6. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

Akhir kata dengan sepuh ketulusan penulis berharap semoga Skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul, Syani. 1995. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Pustaka Jaya. Unila Bandar Lampung.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. PT. Raja grafindo Persada. Jakarta.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi negara*. CV. Pustaka Setia. Bandung.
- Bintoro Tjokroamidjojo. 1984. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES. Jakarta.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Masri Singarimbun Efendi, Sofyan, 2005. *Metode Penelitian Survey*. Pustaka LPJES. Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UIP. Jakarta.
- Sarundajang, SH, 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Syafii, InuKencana, 2016. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Thoha, Miftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik. Kontemporer*, Kencana. Jakarta.

B. DOKUMENTASI

- Undang-undang Dasar 1945
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005
Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2011
Undang-undang No. 23 tahun 2006
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014